

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Masalah**

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. dan tujuan dari pendidikan nasional yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Maka dari itu Pendidikan merupakan sektor sangat menentukan kualitas suatu bangsa, Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa.

Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya: peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana dan stake holder. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas berupa dari siswa, masyarakat, maupun dari pendidik. Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 16) ,menjelaskan bahwa : "Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Dan untuk mengembangkan kualitas dunia pendidikan di abad 20-an ini kita harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dewasa karena informasi ini semakin pesat sehingga membuat dunia semakin sempit, dan jarak bukan menjadi masalah yang berarti dengan adanya teknologi tersebut. Aplikasi teknologi informasi dalam kehidupan sudah semakin beragam sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan belum tersentuh oleh perkembangan teknologi informasi termasuk dunia pendidikan. Khususnya sekolah dasar selalu membutuhkan sistem mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melihat kembali, serta menyalurkan informasi. Salah satu contohnya pengelolaan data yang dilakukan sekolah dasar adalah pengelolaan data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data nilai peserta didik, dan mata pelajaran, data kelas, data pembagian tugas pendidik. Dan Sistem informasi terdiri dari komponen masukan, komponen model, komponen keluaran, komponen teknologi, komponen data dasar, komponen kendali, komponen pemakaian. Sebagai satu sistem, ketujuh komponen tersebut masing – masing berinteraksi satu dengan lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sarannya (Jogiyanto, 1993: 12).

Oleh karena itu untuk membantu instansi pendidikan agar lebih mudah mengelolah data, Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kewenangan untuk merancang prosedur pengumpulan data, melakukan sosialisasi dan membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien serta mengoordinasikan pengumpulan semua data pokok pendidikan dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengumpulan data pokok pendidikan yang dimaksud yaitu meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Karena dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Dalam ajaran 2016/2017, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan surat edaran tentang kebijakan pengelolaan data peserta didik dengan no.31966/A/LL/2016 tertanggal 27 juni 2016. Pada edaran tersebut disebutkan bahwa berdasarkan permendikbud no 79 tahun 2015 tentang dapodik serta memperhatikan perkembangan pengelolaan data peserta didik dalam pemberian nomor induk siswa nasional (NISN), PDSPK telah melakukan koordinasi dengan pengelola dapodikdasmen dengan unit kerja lainnya. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terjadi penyatuan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, diperlukan rancangan mekanisme pendataan yang mengikat seluruh unit kerja terkait, sehingga terjadi integrasi menyeluruh atas aktivitas pendataan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hasil observasi awal di beberapa sekolah khususnya di sekolah dasar negeri se-kecamatan kota barat tentang data pokok pendidikan, untuk setiap jenjang sekolah khususnya Sekolah Dasar Negeri Se-kecamatan Kota Barat mereka sudah menggunakan Dapodik karena lebih memudahkan sekolah dalam mengelola data pokok pendidikan karena arsipnya jika diperlukan mudah dicari dan tidak mudah hilang. Dan untuk itu data pokok pendidikan (Dapodik) ini sangat penting bagi sekolah karena didalam dapodik ada sertifikasi guru, sertifikasi pegawai, data-data siswa, data pegawai, data sarana dan prasarana, selain itu dapodik juga sebagai arsip data untuk kementerian, jadi semua itu terdapat dalam dapodik, yang paling utama adalah sertifikasi karena hal itu yang bisa mengeluarkan surat keputusan tunjangan profesi bagi para guru. Jadi untuk dapodik sendiri sangat berguna/bermanfaat bagi setiap instansi pendidikan khususnya untuk SDN sekecamatan kota barat.

Bagi sekolah dasar yang ada di se-kecamatan kota barat dalam mengembangkan sekolah, mereka menggunakan dapodik karena bagi

sekolah dapodik adalah pendataan skala nasional yang terpadu, untuk merencanakan pendidikan yang matang maka seluruh program yang terbentuk dari perencanaan untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan up to date tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Untuk observasi awal ini penulis lebih fokus kepada kesulitan – kesulitan yang dialami sekolah dalam pengelolaan data pokok pendidikan, Karena untuk pengelolaan data pokok pendidikan tidak selamanya berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana pasti ada saja hambatan atau kesulitan yang dialami sekolah. Kesulitan yang dialami sekolah yaitu seperti jaringan atau sulinya akses internet dan sumber daya manusia. jaringan disekolah masih jadi hambatan dalam pengelolaan data pokok pendidikan, itu menjadi salah satu kesulitan sekolah dalam pengelolaan data pokok pendidikan, karena dalam pengelolaannya semua sudah serba menggunakan online, menginput data, meng-updet data dan pengelolaan lainnya, contohnya seperti operator ingin menginput data tunjangan guru, Kendala sekolah sulit mencari signal akses internet, padahal batas terakhir pengumpulan data sudah ditetapkan, dan harapan sekolah bisa terselesaikan sebelum waktunya Dan untungnya semua bisa terselesaikan

oleh sekolah walaupun agak rumit karena mencari-cari jaringannya menghabiskan waktu 1 jam dan untuk masuk ke situs pusat kerap terjadi gangguan.

Dan adapun kesulitan lainnya yang dialami sekolah dalam pengelolaan data pokok pendidikan yaitu sumber daya manusia dimana kurangnya juga kompotennya tenaga dalam mengoprasikan aplikasi persi baru contohnya seperti kesalahan dalam menginput biodata peserta didik apabila itu salah memasukan itu akan diblok dan sistem tidak akan tersingkronisasi, dan masalah itu hanya dapat diperbaiki lewat verval Pd (validasi peserta didik), tapi yang koordinasi dinas, karena sekolah harus melapor ke operator dinas dulu dan dinas akan konfirmasi, secara otomatis datanya berubah dan itu membuat sekolah menjadi sulit dalam memproses data. Semua itu dikarenakan kurangnya bimtek (bimbingan teknis) sudah 2 tahun ini belum diganti karena menurut sekolah setiap aplikasi pasti ada perubahan data jadi harus perlu ada bimtek (bimbingan teknis), tidak adanya bimtek ini membuat sekolah mencari-cari informasi sendiri bagaimana seharusnya data yang diisi, dan itu membuat sekolah agak sedikit kesulitan dalam mengelolah dapodik karena untuk bimtek (bimbingan teknis) versi baru belum diadakan.

Berdasarkan permasalahan Manajemen sekolah yang baik tentu tidak lepas dari data – data yang banyak dan dapat berubah sewaktu-waktu, dalam hal ini adalah data – data para pengajar dan tentunya data para siswa itu sendiri, Perubahan data tersebut harus tersimpan

dengan baik, sehingga dapat dengan mudah untuk dicari pada saat dibutuhkan. Hal tersebut tentunya membutuhkan suatu program yang bisa membuat pekerjaan lebih efektif, efisien, cepat dan mudah sehingga dapat memberikan informasi dengan tepat dan akurat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Tingkat Kesulitan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Se-kecamatan Kota Barat” dengan harapan dapat menciptakan suatu sistem informasi yang lebih baik dalam melakukan pendataan data pokok pendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan :

1. Bagaimana tingkat kesulitan sekolah dalam prosedur pengumpulan Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kota Barat?
2. Bagaimana tingkat kesulitan sekolah dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kota Barat?
3. Bagaimana tingkat kesulitan sekolah dalam penyajian Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kota Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kesulitan sekolah dalam prosedur pengumpulan Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kota Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesulitan sekolah dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kota Barat?
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesulitan sekolah dalam penyajian Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kota Barat?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan wacana mengenai pentingnya Kesulitan sekolah dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena Sebagai sistem yang digunakan dalam mendapatkan suatu program yang lebih efektif dan efisien serta tepat dan cepat didalam memperoleh informasi untuk pembuatan dan pengolahan data pokok pendidikan. Dapodik juga mempunyai kelemahannya karena semua sistim yang dibuat walaupun sudah dirancang sesempurna mungkin pasti ada kekurangannya juga.



## 2. Secara praktis

- a) Bagi Sekolah Dasar Negeri Se-kota Barat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan data pokok pendidikan (dapodik) lebih optimal pelaksanaannya sehingga benar-benar dapat tersimpan dengan baik.
- b) Untuk staf-staf Sekolah Dasar Negeri Se-kota Barat sekota barat , Mengubah cara kerja dalam pengelolaan data supaya lebih berdaya guna bagi sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Dan harus lebih menguasai aplikasi dapodik agar tidak terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan dapodik.
- c) Untuk peneliti: menambah wawasan lagi tentang data pokok pendidikan (dapodik).